



Media: Tribun Jogja

Hari: Senin

Tanggal: 27 Maret 2017

Halaman: 7

Pemkot Diminta Bertindak Tegas

Depo Pengepresan LPG Tutup Sementara

YOGYA, TRIBUN - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DIY meminta pemerintah kota (Pemkot) Yogyakarta benar-benar bisa menegakkan aturan terkait aktivitas pengepresan tabung LPG di Jalan Argolubang, Baciro, Kecamatan Gondokusuman. Walhi juga mendesak ada kajian tata ruang dan lingkungan terkait dengan depo pengepresan tabung gas tersebut.

"Jika memang belum memiliki izin operasional, maka depo pengepresan ini harus ditutup," kata Halik Sandera, Direktur Eksekutif Walhi DIY, Minggu (26/3).

Halik memaparkan, Pemkot setempat pun harus tegas dalam menegakkan aturan jika memang ada pelanggaran. Sementara, PT Pertamina sebagai pemilik dari depo tersebut, kata dia, sudah seharusnya memang menghentikan suplai tabung yang akan dipres.

Untuk perizinan operasional dan juga gangguan, kata Halik, perlu ada proses dan kajian. Dia juga mempertanyakan apakah sebelumnya pihak PT Pertamina melakukan sosialisasi terkait dengan aktivitas di depo tersebut.

Sosialisasi ini, kata dia, menjadi bagian dari proses pengurusan izin lingkungan. Pemerintah juga perlu mengecek apakah usaha tersebut juga sesuai dengan tata ruang dan wilayah (RTRW). "Perlu dipastikan semuanya," ulasnya.

Kepala Satuan Polist Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta, Nurwidhiarta menyatakan telah memberi surat peringatan pertama

Jika memang belum memiliki izin operasional, maka depo pengepresan ini harus ditutup

Halik Sandera
Direktur Eksekutif Walhi

penghentian aktivitas pengepresan tabung gas elpiji kepada pengelola. Surat peringatan penutupan itu adalah tindak lanjut, setelah pengelola diputus bersalah di pengadilan dan membayar denda Rp400 ribu.

Dia menyebutkan, pengelola sudah diputus sanksi di pengadilan karena melanggar Perda Nomor 5 tahun 2005 tentang izin gangguan (HO) belum lama ini.

"Sudah diputus di pengadilan. Kami juga sudah memberi surat peringatan pertama. Peringatan tertulis untuk penghentian aktivitas pengepresan tabung gas," katanya.

Ketua Forum Warga Baciro Barat (FWBB), Yanto mengatakan, warga sengaja menahan persetujuan izin HO untuk gudang penimbunan dan distribusi serta untuk pengepresan, sebelum ada jaminan tidak ada bau gas lagi yang berasal dari Depo Pertamina.

"Selama masih bau, untuk gudang maupun pengepresan kami masih menolak," ujarnya.

Tutup sementara

Andar Titi Lestari, Area Manager Communication and Relations Pertamina Jawa Bagian Tengah, menjelaskan, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan warga Baciro, Selasa (21/3) lalu. Dalam pertemuan ini, pihaknya sudah bertemu dengan sejumlah perangkat kelurahan seperti RT, RW, dan lurah dan menghasilkan kesepakatan terkait dengan kegiatan rucat di kawasan tersebut.

"Kami menyedot sementara pengepresan dan percutan tabung ini. Saat ini kami sedang berupaya mencari formula agar bau gas tidak tercium dan tidak mengganggu warga," jelasnya.

Andar menjelaskan, bau dari gas elpiji ini sebenarnya adalah bau untuk menandai jika tabung bocor. Meski demikian, pihaknya berupaya merespons keluhan dengan mencari teknologi dan formula yang bisa meminimalkan bau ini.

Jika nantinya formula untuk meminimalisasi bau sudah ditemukan, pihaknya juga akan mengajak warga setempat untuk datang dan menyaksikan proses rucat di depo tersebut. Terkait dengan perizinan, sejauh ini pihaknya sedang menunggu proses izin HO.

"Proses izin ini akan diberikan bila ada persetujuan dari warga. Dari kesepakatan pertemuan para warga HO ini ditujukan untuk kegiatan penimbunan dan pendistribusian. Namun, warga menaguhkan jika digunakan untuk pengepresan," jelasnya. (a)DIY

Sekretaris
Tid

Lanjut
anggapi
etahui
ars

1.
2.
3.
4.
5.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kelurahan Baciro 2. Dinas Lingkungan Hidup 3. Sat Pol PP 4. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005